

KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

MUHAMMAD ILHAM NUR HIDAYAT
NPP 30.0563

*Asal Pendaftaran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: ilhamdimas755@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Syahrir, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The Investment Office and One-Stop Integrated Services are service providers in managing business licenses in Majalengka Regency based on Majalengka Regent Regulation Number 100 of 2018 concerning the Delegation of Licensing and Non-Licensing Authority to the Investment Office and One-Stop Integrated Services of Majalengka Regency. This research is entitled "Performance of the Investment Office and One-Stop Integrated Services in Trading Business Licensing Services in Majalengka Regency".* **Purpose:** *This study is intended to collect related data on trading business licensing services in Majalengka Regency and analyze the Performance of the Investment Office and One-Stop Integrated Services related to business licensing in Majalengka Regency as well as efforts made to improve service quality in DPMPTSP Majalengka Regency. The research method used is descriptive qualitative. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation.* **Method:** *The analytical techniques used in this study are data reduction, data presentation and conclusions.* **Result:** *The data collected during this study was analyzed with performance theory according to Dwiyanto with dimensions of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability adjusted for performance by the Majalengka District of DPMPTSP.* **Conclusion:** *The results showed that the performance of the Investment Office and One-Stop Integrated Services in trading business licensing services was quite good, but there were several aspects that must be improved and improved, such as in terms of internet connectivity and socialization to the public about trading business license applications.*

Keywords: *Business Licenses, DPMPTSP, Performance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi penyelenggara pelayanan dalam pengurusan perizinan usaha di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Penelitian ini berjudul “Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Majalengka”. **Tujuan:** Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data data terkait tentang pelayanan perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Majalengka dan menganalisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan usaha di Kabupaten Majalengka serta upaya yang dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan di DPMPSTP Kabupaten Majalengka. **Metode:** metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Data yang dikumpulkan selama penelitian ini dianalisis dengan teori kinerja menurut Dwiyanto dengan dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas yang disesuaikan dengan kinerja oleh DPMPSTP Kabupaten Majalengka. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan Perizinan Usaha perdagangan sudah cukup baik namun ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan dan diperbaiki seperti dalam hal konektivitas internet dan sosialisasi kepada masyarakat tentang permohonan izin usaha perdagangan.

Kata kunci: DPMPSTP, Kinerja, Perizinan Usaha

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan segala sesuatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan saiga upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Pelayanan publik dapat berupa perizinan dalam usaha dimana penyelenggara pelayanan haruslah memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan perizinan usaha, terwujudnya pelayanan yang cepat, adil, tepat serta transparan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat merupakan harapan dan tujuan bagi setiap lembag institusi dari penyelenggara publik. Pemerintah Kabupaten Majalengka menyelenggarakan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka. Sejalan dengan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 dengan tugas dan fungsinya yaitu :” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah”. Hal tersebut berkaitan dengan pelayanan prima yang akan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Majalengka. Pelayanan perizinan prima meliputi prosedur pelayanan, syarat ketentuan yang jelas dan diarahakan pada masyarakat sehingga mampu menciptakan kinerja pelayanan yang baik sesuai keinginan masyarakat. Pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Majalengka pada pelaksanaannya masyarakat menilai masih kurang maksimal. Dapat dilihat dari dokumen RENSTRA DPMPTSP 2018-2023 Kabupaten Majalengka tentang belum optimalnya pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Majalengka.

Berangkat dari masalah di latar belakang tersebut, karya ilmiah skripsi ini berjudul **“Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Di Kabupaten Majalengka”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi penyelenggara pelayanan dalam pengurusan perizinan usaha di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Namun pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Majalengka pada pelaksanaannya masyarakat menilai masih kurang maksimal. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian dengan judul Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar. Penelitian oleh Zainal, 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kemudian menggunakan metode

deskriptif. Informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu data dan informasi dikumpulkan dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja dari pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini adalah Kinerja pegawai di dinas pekerjaan umum kabupaten takalar sudah cukup baik dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan dan motivasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai.

Kedua yaitu penelitian dengan judul Kinerja DPMPTSP Deli Serdang dalam melaksanakan izin mendirikan Bangunan. Penelitian oleh Sri Indah Wardani, 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi secara langsung dimana dengan mengambil foto atau gambar tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber yang terkait sebagai informan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kualitas dari pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kab. Deli Serdang sudah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala seperti waktu yang belum efektif, kurangnya SDM yang mempunyai, kondisi Lapangan yang tidak sesuai pada dokumen tertera, dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung.

Ketiga yaitu penelitian dengan judul Kinerja DPMPTSP Dalam menerbitkan Surat Izin Usaha di Kota Denpasar. Penelitian ini oleh Ni Putu Kusuma Wardani, 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Kinerja dari DPMPTSP Kota Denpasar pada Penerbitan Surat Izin Usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan pada penerbitan Surat Izin Usaha di Denpasar Masih Belum Optimal dikarenakan yang pertama proses yang lama dan waktu yang tidak efektif. Kemudian yang kedua Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelayanan karena kurangnya sosialisasi pada OSS.

Keempat yaitu penelitian dengan judul Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini oleh Okky Irwanto Ajang, 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kemudian menggunakan metode eksploratif kemudian data dan informasi dikumpulkan dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh T. R. Mitchell. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumandau yaitu dengan meningkatkan kolaborasi dengan pihak kecamatan dikarenakan jika hanya dilakukan hanya pada tingkat desa saja dirasa tidak menghasilkan kinerja pegawai dengan maksimal.

Kelima yaitu penelitian dengan judul Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini oleh Margaretha Rumbekwan dkk, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau dan berbagai kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang dipergunakan sebagai dasar pengamatan dan analisis adalah teori kinerja dari T.R. Mitchell dalam Serdamayanti, (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum optimal dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau hal tersebut dilihat dari lima dimensi kinerja menurut T.R. Mitchell dimana tiga dimensi kerjanya menunjukkan performa masih belum optimal yaitu di dimensi Kualitas kerja, Kemampuan aparatur dan Disiplin kerja sedangkan dua dimensi sudah cukup baik yaitu di dimensi Inisiatif dan Komunikasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) mengenai kinerja dalam organisasi pemerintahan yang memuat 5 (lima) dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk melihat, menganalisis serta mendeskripsikan faktor penghambat kinerja pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui apa saja upaya dari DPMPTSP dalam mengatasi faktor penghambat kinerja pada Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Majalengka.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi langsung di lokasi penelitian dengan pengamatan langsung dan wawancara kepada narasumber terkait objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Majalengka beserta jajarannya, pengusaha, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan teori Dwiyanto (2006) mengenai kinerja dalam organisasi pemerintahan yang memuat 5 (lima) dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kemudian peneliti melakukan dokumentasi di lapangan sebagai penguat data-data dan informasi yang dilakukan selama penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan adalah hasil yang didapatkan oleh Peneliti saat melakukan penelitian di lapangan. Pada subbab hasil penelitian dan pembahasan ini akan dibahas mengenai kinerja pelayanan penerbitan izin mendirikan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini untuk mengetahui kinerja dalam organisasi pemerintahan yang memuat 5 (lima) dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

3.1. Produktivitas DPMPSTSP dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Kabupaten Majalengka

Dalam pembuatan izin usaha pemohon hanya melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan cukup menunggu selama 14 hari kerja. Kemudian setelah dokumen lengkap dari pemohon dan sesuai maka pembuatan izin usaha akan berjalan dan sesuai. indikator untuk *input* dokumen permohonan dan *output* nya izin usaha yang dikeluarkan sudah baik namun dikarenakan adanya ketidaktahuan pemohon yang menyebabkan dokumennya tidak dapat diselesaikan dan harus dilengkapi untuk dapat mengulang permohonan izin usahanya tersebut.

3.2. Kualitas Layanan DPMPSTSP dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Kabupaten Majalengka

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan izin usaha perdagangan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Majalengka juga dapat dilihat dari bagaimana kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat pemohon izin. Kualitas layanan itu sendiri menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan.

a. Ketepatan Waktu Layanan

Kualitas dalam pelayanan organisasi publik ditentukan oleh ketepatan waktu layanan yang diberikan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sesuai prosedur yang ada sehingga pelayanan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan dalam pembuatan dokumen akan mengakibatkan penurunan dalam tingkat kepuasan masyarakat, dimana penurunan tingkat kepuasan akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima. Wawancara dengan Staff di bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Perdagangan :

“Untuk pelayanan izin usaha kami sudah menggunakan sistem *online* yakni OSS dan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik karena dengan adanya sistem pelayanan berbasis *online* dapat memudahkan kita dan juga pemohon yang ingin melakukan permohonan kepada kami. Tetapi ada juga pemohon yang tidak mengerti dalam pembuatan secara *online* maka akan langsung kami bimbing dan ajarkan caranya langsung di kantor kami.”

b. Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana merupakan suatu penunjang dalam kualitas pelayanan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka kualitas pelayanan akan semakin efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga proses pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu sudah terbilang cukup namun masih ada yang perlu diperhatikan dalam menunjang pelayanan yang maksimal.

3.3. Responsivitas DPMPTSP dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Kabupaten Majalengka

Responsivitas dapat dilihat dari daya tanggap aparatur pelayanan dalam menanggapi masalah-masalah ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat dalam pelayanan.

a. Daya Tanggap

Daya tanggap dari pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mendapat apresiasi dari masyarakat selaku pengguna jasa yang mengacu pada hasil wawancara dengan informan, terkhusus pegawai pada bagian informasi dan pengendalian. Keramahan dari pegawai merupakan suatu indikator yang menentukan kepuasan masyarakat, sehingga poin tersebut sangat penting dan tidak boleh dilewatkan, dan harus hadir dalam setiap pelayanan publik, termasuk pelayanan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Majalengka.

b. Akurasi Layanan

Dalam pelaksanaan pelayanan ketepatan pegawai sangat penting dalam mempengaruhi kualitas layanan. Kesalahan yang disebabkan oleh dokumen yang dihasilkan dapat menurunkan kualitas layanan. Respon dari pegawai sangat dibutuhkan dalam melengkapi dokumen izin mendirikan usaha.

3.4. Responsibilitas DPMPTSP dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Kabupaten Majalengka

Dwiyanto (2006:50) menjelaskan bahwa responsibilitas merupakan salah satu dimensi untuk menilai kinerja birokrasi publik dari aparatur dalam suatu organisasi. Responsibilitas merupakan cara untuk melihat apakah birokrasi publik tersebut telah melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya atau tidak. Sebagaimana pendapat dari Dwiyanto tersebut, Penulis memaparkan 2 (dua) indikator dalam mengukur responsibilitas yang dilihat pada indikator pelaksanaan layanan sesuai dengan kebijakan dan indikator pemberian layanan yang sesuai dengan standar pelayanan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pelayanan Sesuai Kebijakan

Peraturan Pemerintahan Kabupaten Majalengka Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, salah satunya mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pada bidang perizinan tertentu dalam pelayanan izin usaha perdagangan. Berdasarkan temuan penulis, tidak ada kecurangan dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Majalengka yang semuanya mengikuti alur dan proses pelayanan, serta tidak ada tambahan uang yang diberikan kepada pihak tertentu untuk memfasilitasi atau mempercepat prosesnya. Kemudian tidak ada pungutan liar dari aparat kepada masyarakat, semua dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tertera dalam brosur izin usaha perdagangan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

b. Pemberian Layanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan

Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

3.5. Akuntabilitas DPMPSTSP dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Kabupaten Majalengka

Akuntabilitas menentukan adil tidaknya penyelenggaraan kegiatan organisasi pemerintah. Kebijakan manajemen harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi. Semua pegawai instansi pemerintah harus mematuhi dan menerapkan ini untuk menjaga kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karena itu, karyawan harus dapat mematuhi berbagai peraturan dan pedoman yang berlaku. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum yang menjadi legalitas dan acuan bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

Menurut pengamatan penulis terkait pernyataan diatas maka efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur dalam pelayanan penerbitan SIUP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka sudah baik. Idealnya tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik dalam bentuk target penyelesaian, sasaran jangka waktu maupun misi organisasi bisa diwujudkan apabila hal ini bisa dikelola dengan baik.

3.6. Faktor-faktor yang Menghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat

Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah peralatan, perlengkapan, fasilitas dan benda lain yang digunakan manusia dalam melaksanakan kegiatannya, hanya saja faktor tersebut belum didapati dengan baik pada bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya pada bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka. Akibatnya pelayanan menjadi terganggu atau terhambat yang menyebabkan beberapa urusan terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat .

Dengan adanya sebuah hambatan dalam kinerja dinas maka dinas harus mencari solusi atau upaya untuk mengatasi hal tersebut. Upaya tersebut yaitu melakukan review dan monev atas pembahasan ketentuan penyelenggaraan perizinan. Menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non perizinan serta *up-dating* dan harmonisasi peraturan perundang undangan antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan daerah. Menunjuk dan menugaskan seksi tertentu yang melakukan harmonisasi dan kajian peraturan perundangan terkait penanaman modal dan perizinan. Kemudian melakukan Sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan, dan Melakukan penyesuaian e-perizinan menjadi web base untuk persiapan online.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Majalengka Provinsi

Jawa Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi penyelenggara pelayanan dalam pengurusan perizinan usaha di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Namun pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Majalengka pada pelaksanaannya masyarakat menilai masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pwnghambat seperti kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perizinan usaha perdagangan. Namun dalam menyikapi hal ini DPMPTSP Kabupaten Majalengka berupaya untuk melakukan review evaluasi dan monev secara berkala untuk meningkatkan pelayanan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya penelitian mengenai Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Di Kabupaten Majalengka dengan menggunakan teori Dwiyanto (2006) mengenai kinerja dalam organisasi pemerintahan yang memuat 5 (lima) dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas sudah baik dan sesuai pada masing-masing dimensi tersebut. Namun masih terdapat adanya hambatan-hambatan seperti kurang lengkapnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai di DPMPTSP. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan review dan monev atas pembahasan ketentuan penyelenggaraan perizinan. Menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non perizinan serta *up-dating* dan harmonisasi peraturan perundang undangan antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan daerah.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 15 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta membuat solusi mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu peneliti juga memiliki keterbatasan menjangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Di Kabupaten Majalengka

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work):

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Di Kabupaten Majalengka. Hal ini diperuntukan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang pertama ditujukan kepada diri sendiri karena dapat bertahan dan semangat pantang menyerah walaupun banyak rintangan

yang dijalani sampai terselesainya penelitian ini dengan baik. Kedua ditujukan kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti. Ketiga ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang mendukung dan membantu dalam penelitian ini. Serta pihak-pihak yang senantiasa memberi semangat dan dukungan kepada peneliti yang tidak dapat disebut satu persatu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ajang, Okky Irwanto. 2019. *Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Dwiyanto, A. (2006) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rumbekwan, Margaretha dkk. 2021. *Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja
- Wardani, Ni Putu Kusuma. 2020. *Kinerja DPMPSTSP dalam Menerbitkan Surat Izin Usaha di Kota Denpasar*.
- Wardani, Sri Indah. 2018. *Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Dalam Melaksanakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*.
- Zainal. 2017. *Kinerja Pegawai Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Makassar: FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

